

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Pemerintah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

Maya Dinul Asrori

Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP.

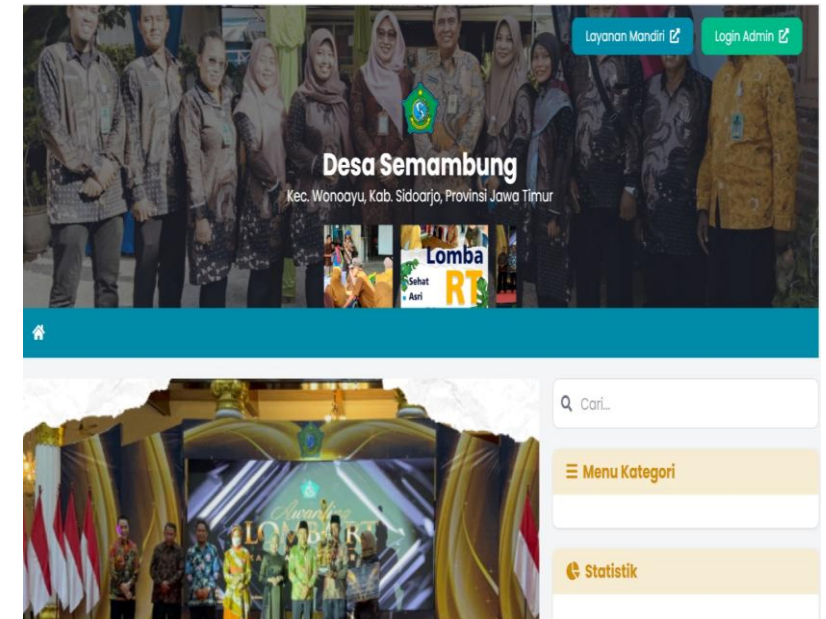
Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2026



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Salah satu implementasinya adalah Sistem Informasi Desa (SID) yang berfungsi sebagai media pengelolaan data, pelayanan administrasi, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Semambung mengembangkan website resmi desa sebagai sarana penyampaian informasi publik secara cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah Desa Semambung juga telah memanfaatkan website desa sebagai bagian dari penerapan SID sejak tahun 2024. Namun, dalam Implementasi SID masih menghadapi beberapa kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.



Tampilan Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa Semambung

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Rumusan Masalah :**

Bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Desa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

- **Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Metode

Jenis Penelitian	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif
lokasi penelitian	Berlokasi didesa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Teknik Pengumpulan Data	Menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi
Teori Penelitan	George C Edward III (2004) indikator: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi
Teknik Penentuan Informan	Teknik purposive sampling
Teknik Analisis Data	Model interaktif Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan)

Hasil

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui website desa. Website ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai profil desa, kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi, serta informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Keberadaan website juga dimana menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik.

Walaupun, implementasi SID desa semambung belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan website. Hambatan ini meliputi penyampaian informasi yang belum merata kepada masyarakat, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, belum adanya SOP khusus pengelolaan SID, serta keterbatasan dukungan anggaran dan kendala teknis pada sistem. Secara keseluruhan, implementasi SID di Desa Semambung telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek agar penyampaian informasi dapat berjalan lebih optimal.

Pembahasan

○ Komunikasi

Berdasarkan indikator komunikasi menurut George C. Edward III, implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah dilakukan melalui website desa sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain website, pemerintah desa juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook agar informasi lebih mudah diterima masyarakat. Namun, proses komunikasi belum berjalan secara optimal karena sosialisasi penggunaan website belum dilakukan secara resmi dan menyeluruh. Informasi mengenai keberadaan website hanya disampaikan kepada kader desa dan ibu-ibu PKK, sehingga masih banyak masyarakat yang mengetahui adanya website tetapi belum memahami cara mengakses maupun memanfaatkan layanan yang tersedia. Disisi lain, kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan SID juga masih terbatas karena sebagian besar belum memiliki pemahaman teknologi yang memadai dan belum memperoleh pelatihan atau bimtek secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui Sistem Informasi Desa.



Gambar 4. Bimbingan teknis (bimtek) dari Kominfo Sidoarjo

Pembahasan

○ Sumber Daya

Pada indikator sumber daya, implementasi SID di Desa Semambung masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Pengelolaan website sepenuhnya dilakukan oleh satu operator tanpa adanya tim khusus maupun pelatihan yang memadai. Selain itu, belum tersedia anggaran khusus untuk mendukung operasional maupun pengembangan website sehingga pengelolaan masih mengandalkan fasilitas yang tersedia di kantor desa. Dari sisi infrastruktur, Desa Semambung telah memiliki jaringan internet yang relatif stabil, perangkat komputer, dan domain resmi desa. Tapi, pengoperasian website masih bergantung pada server pusat sehingga ketika terjadi gangguan server, pemerintah desa tidak dapat melakukan penanganan secara langsung. Website juga belum memiliki optimasi mesin pencari (SEO) yang baik sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan menemukan website melalui Google. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya masih perlu diperkuat agar implementasi SID dapat berjalan secara maksimal.

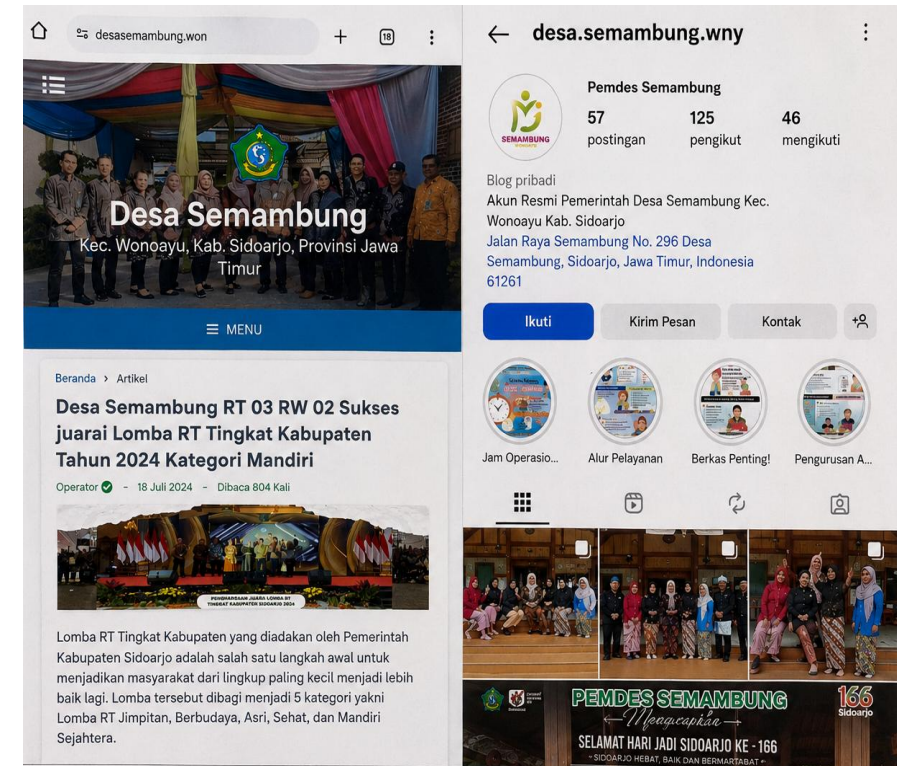
Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Pendukung SID di Desa Semambung.

No	Infrastruktur Pendukung	Kondisi
1.	Website SID	Tersedia
2.	Perangkat komputer/laptop	Tersedia
3.	Jaringan internet	Relatif stabil
4.	Domain resmi desa.id	Tersedia
5.	Server sistem	Bergantung pada server pusat
6.	Optimasi mesin pencari (SEO)	Belum optimal

Pembahasan

○ Disposisi

Disposisi atau Sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat memengaruhi proses implementasinya. Pada indikator disposisi, implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Semambung menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan tersebut. Operator SID berkomitmen untuk terus mengelola dan memperbarui informasi pada website desa sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam Pemanfaatan website, pemerintah desa juga menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat. Meskipun belum didukung pelatihan yang berkelanjutan maupun insentif khusus, operator tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SID masih sangat bergantung pada komitmen dan dedikasi operator dalam menjaga keberlangsungan pelayanan informasi kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukkan operator menjadi faktor penting yang mendukung keberlangsungan implementasi SID di Desa Semambung.



Gambar 5. Pemanfaatan Website dan Instagram Desa Semambung

Pembahasan

○ Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor keempat yang turut berpengaruh pada keberhasilan penerapan kebijakan publik. Pada indikator struktur birokrasi, Pemerintah Desa Semambung telah memiliki pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga koordinasi antarperangkat desa berjalan dengan baik. Namun, pengelolaan Sistem Informasi Desa belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus sehingga mekanisme kerja masih bergantung pada arahan Sekretaris Desa dan operator SID. Selain itu, belum adanya tim pengelola menyebabkan seluruh proses pembaruan informasi masih terpusat pada satu operator. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar pengelolaan SID lebih efektif.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Semambung

Temuan Penting Penelitian

- Implementasi SID telah berjalan, namun belum optimal.
- Komunikasi masih terkendala sosialisasi dan konsistensi informasi.
- Sumber daya terbatas karena hanya satu operator, anggaran dan pelatihan belum memadai.
- Disposisi perangkat desa sudah baik dalam mendukung keterbukaan informasi.
- Struktur birokrasi belum didukung SOP khusus sehingga pembagian tugas belum optimal.

Manfaat Penelitian

○ **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah referensi mengenai implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan publik dan penerapan e-government di tingkat desa.

○ **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Semambung dalam mengembangkan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa, menyusun SOP pengelolaan SID, serta mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui website desa..

Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah mendukung keterbukaan informasi publik, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pada indikator komunikasi, kendala utama terletak pada sosialisasi yang belum merata serta penyampaian informasi yang belum konsisten kepada seluruh masyarakat. Pada indikator sumber daya, implementasi masih terkendala keterbatasan SDM, belum adanya anggaran khusus, serta beberapa hambatan teknis pada website. Dari indikator disposisi, operator menunjukkan komitmen yang baik dalam mengelola SID, tetapi pengelolaannya masih bergantung pada satu orang. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, belum tersedianya SOP khusus dan belum adanya tim pengelola menyebabkan pelaksanaan SID belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada setiap indikator agar implementasi SID dapat mendukung keterbukaan informasi publik secara lebih efektif.

Referensi

- [1] M. F. Dzikrullah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama," J. Negara dan Keadilan, vol. 10, no. 2, pp. 147–155, 2021.
- [2] H. Muntazir, T. Kushartono, and B. Septiansyah, "Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang," J. Prax. idealis, vol. 01, no. 01, 2024.
- [3] A. Qushairi, I. Syafriyani, and D. listia Rika Tini, "Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kantor Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)," Pros. Semin. Nas. Fak. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit., vol. 1, pp. 302–314, 2024.
- [4] F. Sulistyowati, "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village Di Kalurahan Panggungharjo , Sewon , Bantul , DI Yogyakarta Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in," J. Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komun., vol. 23, no. 1, pp. 213–226, 2021.
- [5] U. A. S. Abdiansah, "Penerapaaan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan," Din. J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 5, no. 6, pp. 1472–1479, 2021, doi: 10.31849/dinamisia.v5i6.5621.
- [6] J. Tri Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," J. Komun. DAN Kaji. MEDIA, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- [7] A. O. Setlight, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," Lex Priv., vol. V, no. 4, pp. 59–66, 2017, [Online]. Available: <http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi->
- [8] H. N. Azka and F. U. Najicha, "Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," J. kewarganegaraan, vol. 6, no. 1, pp. 597–602, 2022.

Referensi

- [9] A. Karimullah, R. R. Maulany, and M. Amiruddin, "Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia," *Ma'mal J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 3, no. 4, pp. 335–351, 2022, doi: 10.15642/mal.v3i4.134.
- [10] A. Sucipto et al., "Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari," *J. Soc. Sci. Technol. Community Serv.*, vol. 3, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1512.
- [11] I. Nursetiawan and R. A. K. Putra, "Data dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Ciamis," *J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 8, no. 3, pp. 463–471, 2021.
- [12] A. Apriyansyah, I. Maullidina, and E. P. Purnomo, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul," *JAKPP (Jurnal Anal. Kebijak. Pelayanan Publik)*, vol. 4, no. 1, pp. 10–24, 2018, doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5901.
- [13] W. G. S. Parwita, R. A. Mutiarani, and I. N. W. Adnyana, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan," *J. Widya Laksana*, vol. 10, no. 1, p. 27, 2021, doi: 10.23887/jwl.v10i1.25886.
- [14] S. Sunarto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah li," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 3, no. 2, pp. 97–112, 2021, doi: 10.48093/jiask.v3i2.50.
- [15] M. 8 Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, "Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook," in USA: Sage Publications, 2014, p. Edition 3.
- [16] A. M. Fajar, E. Banowo, and A. M. Mulyadi, "PERAN KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA ORGANISASI DEDIKASI UNTUK NEGERI," *J. Ilmu Komun.*, vol. 12, no. 2085–2428, pp. 70–80, 2022,[Online]. Available: <https://jurnal.akmrtv.ac.id/jk/article/view/305>

Referensi

- [17] S. Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," J. Adm. PUBLIK, vol. 6, no. 94, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824>
- [18] L. S. Naqibah, Y. Cikusin, A. Z. Abidin, J. A. Negara, F. I. Administrasi, and U. I. Malang, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS E-SERVICE (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang) Jl . MT Haryono No . 193 , Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka," J. Respon Publik, vol. 15, no. 9, pp. 22–30, 2021.
- [19] J. A. Reform and M. R. Rahmani, "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di provinsi kalimantan timur," J. Adm. Reform, vol. 8, no. 2, pp. 85–94, 2020.
- [20] D. S. LAARY YURENSI, TULUSAN F.M.G., "Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," J. Adm. Publik, vol. VIII, no. 120, pp. 60–67, 2022.

